

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif disuatu wilayah kerja. Puskesmas sebagai penyelenggara pembangunan kesehatan merupakan bagian integrasi dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, baik secara sosial maupun ekonomi (Kementerin Kesehatan, 2014)

Masalah kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka semakin meningkat pula tuntutan masyarakat akan kualitas kesehatan. Penyedia jasa pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, tidak hanya pelayanan yang sifat penyembuhan penyakit (kuratif) tetapi juga mencakup pelayanan yang bersifat pencegahan (preventif) untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kepuasan bagi pasien selaku pengguna jasa kesehatan (Efendi, 2009).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1027 tahun 2004, pelayanan kefarmasiaan (*Pharmaceutical Care*) adalah bentuk pelayanan dan

tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien salah satu bentuk pelayanan.

Pelaksanaan pelayanan informasi obat merupakan kewajiban farmasis yang didasarkan pada kepentingan pasien, dimana salah satu bentuk pelayanan informasi obat yang wajib diberikan oleh tenaga farmasis adalah pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional atas permintaan masyarakat (Anief, 2007).

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Permenkes, 2016)

Kejadian obat yang merugikan (*adverse drug events*), kesalahan pengobatan (*medication errors*) dan reaksi obat yang merugikan (*adverse drug reaction*) dalam proses pelayanan kefarmasian menempati kelompok urutan utama dalam keselamatan pasien yang memerlukan pendekatan sistem untuk dikelola dengan baik, mengingat kompleksitas kejadian kesalahan

proses farmakoterapi. Terjadinya *medication error* tinggi karena disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik, beban kerja, sistem distribusi dan peran tenaga farmasi belum maksimal sehingga pengobatan tidak sesuai dapat mencelakakan pasien dimana prosedur pengobatan tersebut masih berada dibawah kontrol praktisi kesehatan (Flowler, 2009).

Peran IFRS terhadap keselamatan pasien (*safety*) merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan di instalasi farmasi pasti mengandung resiko baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Oleh karena itu, dengan manajemen resiko, diharapkan kerugian yang timbul dari ketidakpastian dapat dikurangi bahkan dihilangkan untuk kelangsungan pelayanan kesehatan khususnya di instalasi farmasi. Dengan demikian keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam resiko pelayanan di Puskesmas selain resiko keuangan (*financial risk*), resiko properti (*property risk*), resiko tenaga farmasi (*profesional risk*), maupun resiko lingkungan (*enviromtent risk*), pelayanan dalam resiko manajemen.

Keselamatan pasien merupakan salah satu indikator manajemen mutu dalam institusi pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien berhubungan dengan banyak hal, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari infeksi nosokomial, jumlah hari perawatan, biaya perawatan, sampai kepuasan pasien. Terjaminnya keselamatan pasien di sebuah pelayanan kesehatan, akan berdampak pada minimnya penularan infeksi nosokomial. Minimnya kejadian infeksi nosokomial, maka jumlah hari dan biaya

perawatan juga akan berkurang. Jumlah hari perawatan yang wajar dan biaya perawatan yang terjangkau, akan memberikan nilai baik pada kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh institusi pelayanan kesehatan tersebut (WHO, 2005).

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam PIO :

- a. Sumber daya manusia ;
- b. Tempat dan
- c. Perlengkapan

Petunjuk teknis mengenai pelayanan informasi obat akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal (Permenkes, 72 Tahun 2016).

Badan akreditasi dunia *The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations* mensyaratkan adanya kegiatan keselamatan pasien berupa identifikasi dan evaluasi untuk mengurangi cedera dan kerugian pada pasien. Ahli farmakologi menyatakan bahwa kasus pemberian obat yang tidak benar sering terjadi di Indonesia, hanya saja tidak terekspos media massa. Data yang didapat JCAHO juga menunjukkan bahwa 44.000 dari 98.000 kematian yang terjadi setiap tahun disebabkan oleh kesalahan medis (Kuntarti, 2005)

Isu keselamatan (*safety*) pasien melahirkan paradigma baru tentang mutu pelayanan. Mutu pelayanan yang baik saja tidak cukup berarti bagi pasien tanpa memerhatikan bagaimana derajat unsur resiko dan keselamatan yang diterima oleh pasien. Tinggi rendahnya mutu sebanding dengan tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan, untuk mencapai keseimbangan terbaik antara

resiko dan manfaat keselamatan yang diterima oleh pasien. terkait keselamatan di instalasi farmasi yaitu, keselamatan pasien keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, yang berdampak terhadap keselamatan pasien dan petugas, keselamatan lingkungan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan, dan keselamatan terkait dengan kelangsungan hidup (Kemenkes RI, 2010).

Pasien belum tahu dan sadar akan apa yang dilakukan tentang obat-obatan yang diperoleh sebab itu untuk mencegah kesalahan, penyalahgunaan, dan adanya interaksi obat tidak dikehendaki, pelayanan informasi obat dirasa sangat diperlukan oleh masyarakat. Puskesmas Lerep merupakan salah satu puskesmas yang dianggap cukup baik dalam memberikan pelayanan kefarmasiaan, Sehingga perlu diteliti tentang penerapan pelayanan kefarmasiaan dalam bidang pelayanan informasi obat pada pasien di instalasi farmasi Puskesmas Lerep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada pasien diberikan secara lengkap ?
2. Apakah Pelayanan Informasi Obat (PIO) sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) ?
3. Berapa persentase kelengkapan informasi obat yang diberikan oleh Apoteker maupun tenaga kefarmasian kepada pasien berdasarkan nama

obat, dosis obat, aturan pemakaian obat, cara penggunaan obat, indikasi obat, efek samping obat, penyimpanan obat di instalasi farmasi Puskesmas Lerep.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi pemberian Pelayanan Informasi Obat (PIO) oleh instalasi farmasi Puskesmas Lerep.
2. Mengevaluasi kesesuaian Pelayanan Informasi Obat (PIO) yang diberikan dengan Standar Prosedur Operasional (SPO).
3. Menganalisis presentase kelengkapan Pelayanan Informasi Obat (PIO) terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) berdasarkan nama obat, dosis obat, aturan pakai, rute pakai, cara simpan, indikasi kepada pasien.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang pemberian informasi obat (PIO) terhadap pasien dan sebagai sumber acuan yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Instalasi Farmasi Puskesmas

Sebagai bahan evaluasi kata-kata pemberian Pelayanan Informasi Obat (PIO) Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam hal Pelayanan Informasi Obat (PIO) di Puskesmas Lerep.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan setiap pasien mendapatkan Pelayanan Informasi Obat (PIO).

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang digunakan agar dapat dimengerti cakupan dalam pemberian informasi obat yang harus diberikan di instalasi farmasi puskesmas berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO).